



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

**BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

Purworejo, 23 Januari 2024

Nomor : 581/ 41 /BPRBKK/1/2024  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2023

Kepada :  
Yth : Ketua DPP PERBARINDO  
KOMP. PATRA II  
Jln. Jend. Akhmad Yani No. 46  
Cempaka Putih  
DKI JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat., maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2023.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT. BPR BKK PURWOREJO  
(Perseroda)  
  
KABUPATEN PURWOREJO  
**BAMBANG BUDI TRIWAHONO, S.E**  
Direktur Umum dan Kepatuhan 



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

**BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

Purworejo, 13 Januari 2024

Nomor : 581/ 42 /BPRBKK/I/2024  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2023

Kepada :  
Yth : Majalah Media BPR  
Rumah Perbarindo  
Komplek Patra II No. 46  
Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih  
Jakarta Pusat 10510

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat., maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2023.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT. BPR BKK PURWOREJO

(Perseroda)  
  
**BAMBANG BUDI TRIWAHONO, S.E**  
Direktur Umum dan Kepatuhan 



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

**BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

Purworejo, 23 Januari 2024

Nomor : 581/ 40 /BPR BKK/I/2024  
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2023

Kepada :  
Yth : Kepala Kantor OJK Regional 3  
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta  
U.P Bagian Pengawas BPR  
Jalan Kyai Saleh Nomor 12-14 Mugasari  
Semarang Selatan

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2023

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)



**BAMBANG BUDI TRIWAHONO, SE**

Direktur Umum dan Kepatuhan 

**PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)  
TAHUN 2023**



**Kantor Pusat  
Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo  
Telp. (0275) 321 680**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665470-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600649-23012024091522

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bkkpoerjo\_pusat@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-23 09:15:22



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo

Nomor Telepon : (0275) 321680

Penjelasan Umum : Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari definisi Bank tersebut diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, untuk melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana diwajibkan bagi semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam tiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai Dewan Komisaris, Direksi sampai pegawai tingkat pelaksana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Heru Sudibyo	Direktur Utama	1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut : 1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance/GCG Direksi membentuk: Satuan Kerja Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko,, Fungsi Kepatuhan. 6. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris saat diperlukan; 7. Direksi selalu mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); 8. Direksi telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya/luar biasa sesuai kebutuhan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku; 9. Direksi selalu mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Bambang Budi Tri Wahono	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut : 1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance/GCG Direksi membentuk: Satuan Kerja Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko,, Fungsi Kepatuhan. 6. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris saat diperlukan; 7. Direksi selalu mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); 8. Direksi telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya/luar biasa sesuai kebutuhan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku; 9. Direksi selalu mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Heru Sudibyo sebagai Direktur Utama telah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bambang Budi Triwahono sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Satriyo Hidayat	Komisaris Utama	1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasehat kepada Direksi;4. Menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemegang saham, melaksanakan pengawasan pemeriksaan dan pembinaan terhadap perusahaan;5. Mengevaluasi, menganalisis dan merekomendasi perencanaan strategi dan perencanaan tahunan untuk disahkan oleh pemegang saham;6. Menetapkan strategi dasar dan kebijakan dasar perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan;7. Memastikan laporan keuangan valid, tepat waktu, dan mengikuti aturan pelaporan;8. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;9. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;10. Mengawasi jalannya Perusahaan;11. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan internal maupun eksternal;12. Mereview kebijakan mendasar termasuk aplikasi kredit yang besar sebelum menolak, menyetujui, atau merekomendasikan.
2	Dyah Rumantini	Komisaris Utama dan Independen	1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasehat kepada Direksi;4. Menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemegang saham, melaksanakan pengawasan pemeriksaan dan pembinaan terhadap perusahaan;5. Mengevaluasi, menganalisis dan merekomendasi perencanaan strategi dan perencanaan tahunan untuk disahkan oleh pemegang saham;6. Menetapkan strategi dasar dan kebijakan dasar perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan;7. Memastikan laporan keuangan valid, tepat waktu, dan mengikuti aturan pelaporan;8. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;9. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;10. Mengawasi jalannya Perusahaan;11. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan internal maupun eksternal;12. Mereview kebijakan mendasar termasuk aplikasi kredit yang besar sebelum menolak, menyetujui, atau merekomendasikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rekomendasi Kepada Direksi

Tahun 2023 telah dilakukan seleksi Anggota Komisaris dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dan yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR, Anggota Dewan Komisaris dari Pemerintah Kabupaten telah disahkan dalam RUPS tanggal 17 Mei 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko karena Modal Inti masih dibawah 50 Milyar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Direksi tidak memiliki saham di BPR

### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah tingkat II Purworejo dengan demikian anggota Direksi PT BPRBKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Bambang Budi Tri Wahono	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Heru Sudiby	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada hubungan keuangan diantara ke dua anggota Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Heru Sudibyو	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Bambang Budi Tri Wahono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada hubungan keluarga diantara ke dua anggota Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemingintah tingkat II Purworejo dengan demikian anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Satriyo Hidayat	Satriyo Hidayat	tidak ada	tidak ada
2	Dyah Rumantini	Dyah Rumantini	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) berasal dari kalangan profesional dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Satriyo Hidayat	Satriyo Hidayat	tidak ada	tidak ada
2	Dyah Rumantini	Dyah Rumantini	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dengan ke dua anggota Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	177984000	1	60646400
2	Tunjangan	2	456736320	1	150532480
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	49475000	1	7200000
	Total		684195320		218378880

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/Kebijakan Remunerasi yang diterima Direksi dan dewan komisaris PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah sesuai apa yang ditetapkan dalam RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Sewa rumah untuk Direktur Utama	tidak ada
2	Transportasi	satu unit mobil Toyota Inova untuk Direktur Utama dan satu unit mobil Toyota Rush untuk Direktur Umum dan Kepatuhan, satu unit sepeda motor Scoopy untuk Direktur Utama	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) mendapatkan fasilitas sewa Rumah karena berasal dari luar kabupaten Purworejo untuk memudahkan menjalankan aktivitas dalam tugasnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,77	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,59	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,18	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan hasil RUPS dan gaji yang diterima karyawan sesuai dengan SK Dir yang berlaku di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-01-2023	3	Rapat Direksi dengan agenda rapat Rencana pendidikan pegawai di Magelang dan Monitoring Calon Pegawai baru
2	03-04-2023	3	Rapat Direksi dengan agenda rapat Libur Lebaran 1444 H dan Pemverian THR dan Bingkisan Lebaran
3	22-11-2023	3	Rapat Direksi dengan agenda rapat mutasi pegawai dan Sk Pesangon Sdr. Diani Budi Lestari
4	05-12-2023	3	Rapat Direksi dengan agenda rapat capaian kinerja akhir November 2023
5	23-06-2023	3	Rapat Dewan Komisaris dengan agenda Rapat Kelengkapan Kepengurusan Dewan Komisaris
6	15-08-2023	3	Rapat Dewan Komisaris dengan agenda rapat Penekanan kepada Direksi Capaian Kinerja September 2023
7	01-12-2023	3	Rapat Dewan Komisaris dengan agenda rapat pelatihan Penyegaran APU PPT ke 2 tahun 2023 dan persiapan tutup buku akhir tahun 2023
8	22-12-2023	3	Rapat Dewan Komisaris dengan agenda rapat Masa Jabatan Direktur Umum dan Kepatuhan dan masa jabatan Komisaris Utama
9	16-02-2023	4	Rapat Pengurus dengan agenda rapat Masa Jabatan Direktur Utama, Pembinaan kepada Calon Pegawai dan Persiapan Monev atas kinerja triwulan I tahun 2023
10	12-04-2023	4	Rapat Pengurus dengan agenda rapat Rotasi , Mutasi, dan Promosi Pegawai bulan April 2023
11	14-07-2023	5	Rapat Pengurus dengan agenda rapat Pembahasan capaian kinerja Triwulan ke 2 tahun 2023
12	13-10-2023	5	Rapat Pengurus dengan agenda rapat Penyesuaian SOP APU PPT berdasar POJK No 8 tahun 2023 POJK No 8 tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat yang diselenggarakan adalah rapat Direksi, Rapat Pengurus, dan Rapat Dewan Komisaris , rapat Dewan komisaris sudah dapat dilakukan sejak 17 Mei 2023 dengan ditetapkannya Sdr Dyah Rumantini sebagai Komisaris Anggota. Rapat Direksi diselenggarakan sebanyak 4 kali rapat dan Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 8 kali rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Satriyo Hidayat	8	0	66,67
2	Dyah Rumantini	8	0	66,67

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam Tahun 2023 diadakan Rapat Pengurus dengan Dewan Komisaris sebanyak 8 kali rapat, dan Dewan Komisaris hadir pada setiap rapat yang diadakan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama kurun waktu tahun 2023 terjadi 1 (satu) kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap , namun demikian kepada yang bersangkutan telah diberikan sanksi dengan penurunan jabatan, dan saat ini yang bersangkutan telah di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama kurun waktu tahun 2023 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Heru Sudibyو	Direktur Utama	Heru Sudibyو	Direktur Utama	tidak ada	0	tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
2	Bambang Budi Triwahono	Direktur Umum dan Kεpatuhan	Bambang Budi Triwahono	Direktur Umum dan Kεpatuhan	tidak ada	0	tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
3	Ir. Satriyo Hidayat	Dewan Komisaris	Ir. Satriyo Hidayat	Dewan Komisaris	tidak ada	0	tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
4	Dyah Rumantini	Anggota Dewan komisaris	Dyah Rumantini	Anggota Dewan komisaris	tidak ada	0	tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama kurun waktu tahun 2022 tidak adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230109	Kegiatan Sosial	luran sampah bulan Feb	Petugas kebersihan	50.000
2	20230125	Kegiatan Sosial	Sumbangan Milad PPKP dan santunan Yatim Piatu	Panitia Milad PPKP dan santunan Yatim Piatu	250.000
3	20230127	Kegiatan Sosial	Sumbangan Merti Desa Kab. Purworejo	Panitia Merti Desa Kab. Purworejo	250.000
4	20230202	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Pebruari 2023	Bapak kyai mushola	125.000
5	20230202	Kegiatan Sosial	luran kebersihan jan-februari cab Bener	Petugas kebersihan	50.000
6	20230206	Kegiatan Sosial	Sumbangan Hari Jadi Kabupaten Purworejo Kab Purworejo	Panitia Hari Jadi Kab. Purworejo	250.000
7	20230206	Kegiatan Sosial	Sumbangan Hari Jadi Kabupaten Purworejo Kec Purwodadi	Panitia Hari Jadi Kab. Purworejo Kec Purwodadi	150.000
8	20230206	Kegiatan Sosial	Sumbangan Hari Jadi Kabupaten Purworejo Kec Kutoarjo	Panitia Hari Jadi Kab. Purworejo Kec.Kutoarjo	250.000
9	20230206	Kegiatan Sosial	luran kebersihan februari cab Purwodadi	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
10	20230206	Kegiatan Sosial	luran sampah bulan Februari	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
11	20230207	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan Merti Desa Besole thn 2023	Panitia Kegiatan Merti Desa Besole thn 2023	250.000
12	20230207	Kegiatan Sosial	Sumbangan Hari jadi Kab. Purworejo Kec.Kaligesing	Panitia Hari jadi Kab. Purworejo Kec.Kaligesing	250.000
13	20230208	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan Isro Miraj Kerto Desa Kelurahan Baledono	Joko S	250.000
14	20230208	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan Lomba Paduan Suara antar desa (DP3APMD)	Panitia Lomba Paduan Suara antar desa (DP3APMD)	250.000
15	20230214	Kegiatan Sosial	Sumbangan Hari jadi Kab. Purworejo Kec.Bruno	Panitia Hari jadi Kab. Purworejo Kec.Bruno	250.000
16	20230216	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan peresmian TEFA dan Ultah SMK Muhammadiyah Purwodadi	Panitia kegiatan TEFA dan Ultah SMK Muhammadiyah Purwodadi	200.000
17	20230222	Kegiatan Sosial	Karangan Bunga Duka Cita untuk PT Unggulrejo	PT Unggulrejo	450.000
18	20230224	Kegiatan Sosial	Sumbangan Hari jadi Kab. Purworejo Kec.Bener	Panitia Hari jadi Kab. Purworejo Kec.Bener	250.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
19	20230307	Kegiatan Sosial	Kegiatan sosial Poskobri Purworejo	Panitia Kegiatan sosial Poskobri Purworejo	150.000
20	20230307	Kegiatan Sosial	Iuran kebersihan bulan maret cab Purwodadi	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
21	20230309	Kegiatan Sosial	Yasinan rutin Cabang Banyuurip Bulan Maret 2023	Bapak kyai mushola	125.000
22	20230331	Kegiatan Sosial	Partisipasi Dana Kegiatan Sosialisasi Operasi Ketupat Candi 2023 Purworejo	Panitia Operasi Ketupat Candi 2023 Purworejo	300.000
23	20230403	Kegiatan Sosial	Sumbangan Ramadhan Keren Kec. Kemiri	Panitia Ramadhan Keren Kec. Kemiri	250.000
24	20230404	Kegiatan Sosial	Iuran kebersihan bulan April cab Purwodadi	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
25	20230413	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan April 2023	Bapak kyai mushola	125.000
26	20230413	Kegiatan Sosial	Sumbangan Festival Ramadhan Kecamatan Bruno	Panitia Festifal Ramadhan Kecamatan Bruno	250.000
27	20230426	Kegiatan Sosial	Sumbangan Qurban, Anak Yatim, Bazar KUA Kemiri	Panitia Qurban, Anak Yatim, Bazar KUA Kemiri	250.000
28	20230509	Kegiatan Sosial	Iuran kebersihan bulan Mei cab Purwodadi	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
29	20230517	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Mei 2023	Bapak kyai mushola	125.000
30	20230606	Kegiatan Sosial	Iuran kebersihan bulan Juni cab Purwodadi	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
31	20230622	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Juni 2023	Bapak kyai mushola	125.000
32	20230622	Kegiatan Sosial	Donasi untuk Forum Komunikasi Anak Kab. Purworejo	Forum Komunikasi Anak Kab. Purworejo	200.000
33	20230630	Kegiatan Sosial	Sumbangan Pelatihan Sembelih halal dan sehat FKPAI Bruno	Panitia Pelatihan Sembelih halal dan sehat FKPAI Bruno	250.000
34	20230707	Kegiatan Sosial	Iuran kebersihan bulan Juli cab Purwodadi	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
35	20230710	Kegiatan Sosial	Satu ekor Sapi Kurban	Panitia Kurban Kab Purworejo thn 2023	22.500.000
36	20230712	Kegiatan Sosial	Kontribusi Siskamling Juli 2023 Juli 2024	Kelurahan Purworejo	360.000
37	20230721	Kegiatan Sosial	Selamatan ruang arif cab Pituruh	Katering Pituruh	300.000
38	20230721	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec. Kutoarjo	Panitia HUT RI Ke 78 Cab Kutoarjo	250.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
39	20230727	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Juli 2023	Bapak kyai mushola	125.000
40	20230731	Kegiatan Sosial	Sumbangan Lomba-Lomba PDAU Kab Purworejo	Panitia Lomba-Lomba PDAU Kab Purworejo	1.000.000
41	20230731	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec. Bayan	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Bayan	250.000
42	20230801	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec. Banyuurip	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Banyuurip	250.000
43	20230802	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec. Bagelen	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Bagelen	250.000
44	20230802	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec. Kemiri	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Kemiri	250.000
45	20230807	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec. Bruno	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Bruno	250.000
46	20230808	Kegiatan Sosial	Iuran kebersihan bulan Agustus cab Purwodadi	Petugas kebersihan Cipata Karya Purwodadi	50.000
47	20230808	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec. Pituruh	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Pituruh	250.000
48	20230809	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec Gebang	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Gebangf	250.000
49	20230810	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec Purworejo	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Gebang	250.000
50	20230810	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec Bener	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Bener	100.000
51	20230810	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec Purwodadi	Panitia HUT RI Ke 78 Kec. Purwodadi	250.000
52	20230811	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 78 Kec Ngombol	Panitia HUT RI Ke 78 Kec Ngombol	250.000
53	20230822	Kegiatan Sosial	Donasi HUT RI Ke 78 Kab. Purworejo	Panitia HUT RI Ke 78 Kab. Purworejo	500.000
54	20230831	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Agustus 2023	Bapak kyai mushola	125.000
55	20230919	Kegiatan Sosial	Partisipasi Pembelian kaos PRIMKOPPABRI Purworejo	PRIMKOPPABRI Purworejo	130.000
56	20231005	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Oktober 2023	Bapak kyai mushola	125.000
57	20231010	Kegiatan Sosial	Menjenguk Nasabah Cab Banyuurip	Nasabah Cab Banyuurip	101.000
58	20231010	Kegiatan Sosial	Sumbangan PBSI Purworejo Kejurkab PBSI Milkilive Kab. Purworejo	Panitia PBSI Purworejo /Kejurkab PBSI Milkilive Kab. Purworejo	500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
59	20231020	Kegiatan Sosial	Partisipasi Pembelian kalender 2024 Markas Komando Pusat Lembaga Bela Negara RI	Panitia pengadaan kalender Markas Komando Pusat Lembaga Bela Negara RI	100.000
60	20231023	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana PMI (Kelurahan Cangkreng Lor)	Kelurahan Cangkreng Lor	15.000
61	20231024	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan Merti Desa Banyuurip 2023	Panitia Merti Desa Banyuurip 2023	100.000
62	20231030	Kegiatan Sosial	Sumbangan Bulan Dana PMI Kab Purworejo tahun 2023	Panitia Bulan Dana PMI Kab Purworejo tahun 2023	3.500.000
63	20231031	Kegiatan Sosial	Bantuan snack UMKM dalam rangka bazar UMKM	Panitia bazar UMKM Purworejo	1.435.100
64	20231109	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Nopember 2023	Bapak kyai mushola	125.000
65	20231110	Kegiatan Sosial	Tabur Bunga Ziarah Taman Makam Pahlawan	Petugas Tabur Bunga	100.000
66	20231110	Kegiatan Sosial	Sumbangan PorKab Kecamatan Kemiri	Panitia PorKab Kecamatan Kemiri	200.000
67	20231113	Kegiatan Sosial	Sponsor Pameran Buku Tahun 2023	Ari Setya / Dinas Arsip Purworejo	500.000
68	20231127	Kegiatan Sosial	Partisipasi Kegiatan Korpri Kab. Purworejo	Korpri Kabupataen Purworejo	500.000
69	20231205	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan HUT Satpam Polres Purworejo	Panitia HUT Satpam Polres Purworejo	260.000
70	20231214	Kegiatan Sosial	Yasinan Rutin Cabang Banyuurip Bulan Desember 2023	Bapak kyai mushola	125.000
71	20231218	Kegiatan Sosial	Partisipasi Pasar Murah (Dinas KUKMP)	Dinas KUKMP	500.000
72	20231230	Kegiatan Sosial	Sumbangan Gebyar Tahun baru 2024 Kecamatan Bruno	Panitia Gebyar Tahun baru 2024 Kecamatan Bruno	250.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama kurun waktu tahun 2023 PT BPR BKK memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial yang dilaksanakan di lingkungan kantor cabang maupun kantor pusat

Nama BPR	: PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jalan Urip Sumoharjo No 20 Purworejo
Nomor Telepon	: (0275)321680
Modal Inti BPR	: 16.426.015.150,00
Total Aset BPR	: 144.204.709.561,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: BPR mempunyai Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dengan SK Dir No.581/138/SKDIR/BPRBKK/VI/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;BPR mempunyai Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.Anggota Komisaris telah lolos Uji Kemampuan dan Kepatutan dan disyahkan melalui RUPS tanggal 17 Mei 2023;BPR belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko karena Modal Inti dibawah 50 Milyar;BPR memiliki SOP Penanganan Benturan Kepentingan dengan SK Dir No. 581/95/SKDIR/BPRBKK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021,dan selama tahun 2023 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan;BPR memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah menunjuk satu pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan yang memonitor pelaksanaan kebijakan, ketentuan dan prosedur dalam kegiatan usaha BPR;BPR memiliki pedoman Audit Intern sesuai SK Dir No 581/158.A/SK Dir/BPRBKK/IX/2022 dan Pedoman Audit TSI dengan SK Dir No 581/158.B/SKDir/BPRBKK/IX/2022,BPR memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern yang bersifat Independen dalam mengawasi kegiatan operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;BPR telah menunjuk Akuntan Publik dengan persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai POJK, serta melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK sesuai ketentuan;BPR memiliki SOP Manajemen Risiko dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko, dan telah melaporkan 4 profil Risiko sesuai ketentuan;BPR memiliki pedoman mengenai BMPK yang tertuang dalam PKPB dan SOP Perkreditan serta diatur dalam Sk Dir No. 581/269/SKDir/BPRBKK/VIII/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Batas Maksimum Penyaluran Dana.Laporan BMPK dilaporkan sesuai ketentuan;Rencana Bisnis disusun dan disetujui Dewan Komisaris dan pemegang Saham;Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten dan Laporan Keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan ke OJK tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,90	0,22	1,62	0.324	Jumlah Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) terdiri dari 2 orang, yang bertugas sebagai Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan SK Dir No. 581/138/SKDIR/BPR BKK/VI/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	1,20	0,30	2,11	0.317	Sampai dengan Desember tahun 2023 jumlah Dewan Komisaris di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah sesuai dengan ketentuan, anggota Dewan Komisaris dari pemerintah Kabupaten telah lolos Uji Kelayakan dan Keputusan OJK dan telah di RUPS kan pada tanggal 17 Mei 2023
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko karena Modal Inti masih dibawah 50 Milyar
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,80	0,10	1,40	0.140	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki pedoman benturan yaitu SOP Penanganan Benturan Kepentingan pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang telah syahkan dengan SK Direksi No. 581/95 /SKDIR/BPR BKK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, dan selama tahun 2023 tidak adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,04	0,27	2,41	0.241	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani operasional penanganan dana, dan juga telah menunjuk satu pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan memonitoring tentang seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR apakah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Dan dalam kurun waktu tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran peraturan dan ketentuan OJK serta telah melakukan kewajiban pelaporan tepat waktu.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	0,90	0,20	2,30	0.230	Bank telah memiliki pedoman Audit Intern dan di tahun 2022 telah mengkinikan Pedoman Audit Intern yaitu Pedoman Audit Intern Umum dikeluarkan dengan Sk Dir No 581/158.A/SK Dir/BPRBKK/IX/2022 dan Pedoman Audit TSI dikeluarkan dengan Sk Dir No 581/158.B/SK Dir/BPRBKK/IX/2022, dan telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Bank telah menunjuk Akuntan Publik setelah adanya persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,14	0,25	2,73	0.273	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko, dan pada semester 1 tahun 2023 telah melaporkan 4 profil Risiko sesuai ketentuan OJK, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,10	2,10	0.158	Bank telah memiliki prosedur BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan tertuang dalam Sk Dir No. 581/269/SK,Dir/BPRBKK/VIII/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Batas maksimum Penyaluran Dana Pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), dan laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan dan tepat waktu
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	1,20	0,10	2,14	0.161	Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang Saham
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,80	0,10	1,40	0.105	Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten dan Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, dan ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki 2 orang Dewan Komisaris sejak 17 Mei 2023
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan di RUPSKan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 orang Dewan Komisaris dari Propinsi tinggal di Semarang dan 1 orang anggota Dewan Komisaris tinggal di kota Purworejo
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah disahkan dengan SK Dir
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Ketua Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan, Anggota Komisaris merangkap jabatan sebagai Anggota Komisaris di Bank Purworejo (milik PemKab Purworejo)
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Direksi atau sesama Anggota Dewas

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	5	Dewan Komisaris belum melakukan Evaluasi kebijakan BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris tidak selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	4	Dewan Komisaris yang bertempat tinggal di luar kota Purworejo belum menyediakan waktu secara cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	4	Anggota Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan atas laporan Direksi
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	karena modal BPR kurang dari 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	karena modal BPR kurang dari 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	karena modal BPR kurang dari 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	karena modal BPR kurang dari 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	karena modal BPR kurang dari 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum pernah terjadi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Belum pernah terjadi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur Umum dan Kepatuhan tidak menangani operasional penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah ditunjuk dan independen terhadap bidang operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE Kepatuhan belum mengkinikan pedoman kerja dan sisdur kepatuhan secara menyeluruh
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan ada dalam Job Des yang telah diterbitkan dengan SK Dir
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan monitoring yang berhubungan dengan ketentuan dan pelaporan kepada OJK
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Dilakukan sosialisasi jika ada ketentuan baru.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direrktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan monitoring atas komitmen2 hasil LHP OJK .
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan, memonitoring tentang pelaksanaan kebijakan , sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reuiu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan, melakukan pengkinian ketentuan2 perusahaan sesuai dengan ketentuan OJK namun belum secara maksimal
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	selam tahun 2023 Masih terdapat pelanggaran ketentuan intern namun tidak menimbulkan kerugian yang signifikan,

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	tidak terdapat Laporan Khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. di periode tahun 2022
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern yaitu SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur pelaksanaan tugas yang telah disetujui oleh Direksi
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	SKAI secara berkala sudah melaksanakan audit intern dan independen terhadap operasional BPR
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI sebagai pelaksana fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	5	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah mempunyai pedoman audit intern, dan telah melaksanakan audit intern diseluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar) memberikan skala penerpn Bin (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Kegiatan audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan fungsi audit intern, dengan pelatihan namun belum secara berkala
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Diruktur Umum dan Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit Intern kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum melakukan kaji ulang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk SKAI sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR telah menunjuk Akuntan Publik setelah adanya persetujuan Komisaris melalui RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan manajemen letter telah disampaikan KAP kepada BPR secara tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	cakupan hasil audit telah sesuai dengan POJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki SOP Manajmen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	BPR belum memiliki SOP Produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menetapkan SOP Mananjemen Risiko dan menerbitkan Sk Dir Kewenangan kredit dan Komite Kredit

Form B.08.00

## Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko namun belum mengevaluasi dan ikut dalam memutuskan permohonan transaksi yang berkaitan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	BPR belum melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh namun belum dilaksanakan secara maksimal
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM namun belum secara menyeluruh dan berkesinambungan
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang memadai
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM namun belum secara menyeluruh dan berkesinambungan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Bank telah memiliki prosedur BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda). dan tertuang dalam Sk Dir No. 581/269/SK,Dir/BPRBKK/VIII/2023
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	bank mengevaluasi prosedur BMPK jika ada perubahan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK , namun perlu peningkatan prinsip kehati hatian
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank tidak melanggar BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis telah disusun dan telah ada rencana jangka panjang
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis didukung Pemegang saham, dalam rangka pemenuhan segala ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor intern , ekstern dan prinsip kehati hatian
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	4	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis namun kuantitasnya perlu ditambah
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

**BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa,

Laporan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2023, telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai berikut :

1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Purworejo, 23 Januari 2024

DIREKSI

PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)

HERU SUDIBYO, BPA, S.E., M.M. BAMBANG BUDI TRUWAHONO, S.E.

Direktur Utama

Direktur Umum dan Kepatuhan

Menyetujui

Ir. SATRIYO HIDAYAT

Komisaris Utama

DYAH RUMANTINI, S.E., MAP.

Komisaris Anggota

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR BKK PURWOREJO (Perseroda)

Posisi : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,011	2
Analisis	
<p><b>1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</b> Jumlah Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) terdiri dari 2 orang, yang bertugas sebagai Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan SK Dir No. 581/138/SKDIR/BPR BKK/VI/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi;</p> <p><b>2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</b> Sampai dengan Desember tahun 2023 jumlah Dewan Komisaris di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda ) telah sesuai dengan ketentuan, anggota Dewan Komisaris dari pemerintah Kabupaten telah lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK dan telah di RUPS kan pada tanggal 17 Mei 2023;</p> <p><b>3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite</b> PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko karena Modal Inti masih dibawah 50 Milyar;</p> <p><b>4. Penanganan Benturan Kepentingan</b> PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki pedoman benturan yaitu SOP Penanganan Benturan Kepentingan pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang telah syahkan dengan SK Direksi No. 581/95 /SKDIR/BPR BKK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, dan selama tahun 2023 tidak adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p>	

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR**

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani operasional penanganan dana, dan juga telah menunjuk satu pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan memonitoring tentang seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR apakah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Dan dalam kurun waktu tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran peraturan dan ketentuan OJK serta telah melakukan kewajiban pelaporan tepat waktu.;

**6. Penerapan Fungsi Audit intern**

Bank telah memiliki pedoman Audit Intern dan di tahun 2022 telah mengkinikan Pedoman Audit Intern yaitu Pedoman Audit Intern Umum dikeluarkan dengan Sk Dir No 581/158.A/SK Dir/BPRBKK/IX/2022 dan Pedoman Audit TSI dikeluarkan dengan Sk Dir No 581/158.B/SK Dir/BPRBKK/IX/2022, dan telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;

**7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Bank telah menunjuk Akuntan Publik setelah adanya persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu;

**8. Penerapan Fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern**

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko, dan pada semester 1 tahun 2023 telah melaporkan 4 profil Risiko sesuai ketentuan OJK, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas;

**9. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Bank telah memiliki prosedur BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda). dan tertuang dalam Sk Dir No. 581/269/SK,Dir/BPRBKK/VIII/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Batas maksimum Penyaluran Dana Pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), dan

laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan dan tepat waktu;

**10. Rencana Bisnis BPR**

Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang Saham;

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten dan Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, dan ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.

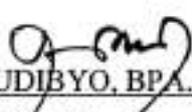
Dari hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) untuk periode 31 Desember 2023, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG mempunyai nilai komposit 2,011 dan memperoleh peringkat 2 (dua) atau "Baik".

Demikian laporan ini kami sampaikan dan terimakasih..

Purworejo, 23 Januari 2024

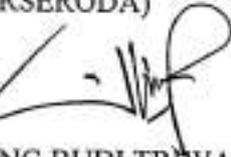
DIREKSI

PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)

  
HERU SUDIBYO, BPA., S.E., S.M.

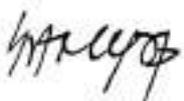
Direktur Utama



  
BAMBANG BUDI TRIWAHONO, S.E.

Direktur Umum dan Kepatuhan

Menyetujui

  
Ir. SATRIYO HIDAYAT

Komisaris Utama

  
DYAH RUMANTINI, S.E., MAP.

Komisaris Anggota